

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kuala Lumpur *Stock Exchange* (KLSE). Tahun penelitian mencakup data pada tahun 2012-2014, hal ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi yang akan diuji. Berdasarkan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan pada bab III, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 225 (Indonesia) dan 489 (Malaysia) perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Adapun rincian pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel di Indonesia

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> di BEI	131	134	151	416
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut	(20)	(23)	(40)	(83)
3.	Total perusahaan yang dijadikan sampel	111	111	111	333
4.	Data <i>outlier</i>	(36)	(36)	(36)	(108)
Total sample perusahaan yang diteliti		75	75	75	225
Sumber: hasil pengolahan data					

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 111 perusahaan, dengan 3 tahun penelitian maka total *sample* yang diteliti sebanyak 333. Ditemukan data yang *outlayer* sebanyak 36 *sample* per

tahunnya, sehingga *sample* pertahun yang diteliti sebanyak 75 perusahaan. Dalam waktu 3 tahun, total *sample* yang diteliti sebanyak 225.

Tabel 4.2
Prosedur Pemilihan Sampel di Malaysia

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> di BEI	252	252	264	768
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut	(21)	(21)	(33)	(75)
3.	Total perusahaan yang dijadikan sampel	231	231	231	693
4.	Data <i>outlier</i>	(68)	(68)	(68)	(204)
Total <i>sample</i> perusahaan yang diteliti		163	163	163	489
Sumber: hasil pengolahan data					

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 231 perusahaan, dengan 3 tahun penelitian maka total *sample* yang diteliti sebanyak 693. Ditemukan data yang *outlayer* sebanyak 68 *sample* per tahunnya, sehingga *sample* pertahun yang diteliti sebanyak 163 perusahaan. Dalam waktu 3 tahun, total *sample* yang diteliti sebanyak 489.

B. Uji Kualitas Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*) dari variabel independen dan variabel dependen.

Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
Indonesia

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MDSC	225	,37	,53	,4524	,04021
ADK	225	2,00	7,00	4,0133	1,46836
DKI	225	,17	0,75	,4197	,12224
JKA	225	2,00	5,00	3,0933	,40664
JRKA	225	1,00	18,00	5,5911	3,30069
Valid N (listwise)					

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian di Indonesia sebanyak 225 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: variabel *mandatory disclosure konvergensi IFRS* (MDSC) memiliki nilai minimum sebesar 0,37; nilai maksimum sebesar 0,55 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4524 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,04021.

Variabel proporsi dewan komisaris (ADK) memiliki nilai minimum sebesar 2,00; nilai maksimum sebesar 7,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0133; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,46836. Variabel dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai minimum sebesar 0,17; nilai maksimum sebesar 0,75; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4179; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,12224. Variabel jumlah komite audit (JKA) memiliki nilai minimum sebesar 2,00; nilai maksimum sebesar 5,00 nilai rata-

rata (*mean*) sebesar 3,0933; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,40664. Variabel jumlah rapat komite audit (JRKA) memiliki nilai minimum sebesar 1,00; nilai maksimum sebesar 15,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5,5911; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 3,30069.

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif
Malaysia

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MDSC	489	,42	,52	,4671	,03020
ADK	489	4,00	10,00	6,92	1,389
DKI	489	,25	0,75	,4794	,12074
JKA	489	3,00	4,00	3,24	,427
JRKA	489	4,00	6,00	4,68	,578
Valid N (listwise)					

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian di Malaysia sebanyak 489 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: Variabel *mandatory disclosure konvergensi IFRS* (MDSCORE) memiliki nilai minimum sebesar 0,42; nilai maksimum sebesar 0,52 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4671 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,03020.

Variabel proporsi dewan komisaris (ADK) memiliki nilai minimum sebesar 4,00; nilai maksimum sebesar 10,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6,92; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,389. Variabel dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai minimum sebesar 0,25; nilai maksimum sebesar 0,75; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4794; dan simpangan

baku (*standar deviation*) sebesar 0,12074. Variabel jumlah komite audit (JKA) memiliki nilai minimum sebesar 3,00; nilai maksimum sebesar 4,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,24; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,427. Variabel jumlah rapat komite audit (JRKA) memiliki nilai minimum sebesar 4,00; nilai maksimum sebesar 6,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,68; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,578.

C. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

Tabel 4.5
Uji Normalitas
Indonesia
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		225
Normal Parameters(a,b)	Mean	-,0006544
	Std. Deviation	,03702305
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		1,306
Asymp. Sig. (2-tailed)		,066

Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,066 > \alpha (0,05)$. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan menggunakan *sample* dari perusahaan Indonesia berdistribusi normal.

Tabel 4.6
Uji Normalitas
Malaysia
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		489
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02985845
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,093
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		2,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan menggunakan *sample* dari perusahaan Malaysia tidak berdistribusi normal. Namun hasil data tersebut tetap dapat digunakan untuk uji hipotesis karena *sample* dalam model ini lebih dari 100 *sample* sehingga asumsi normalitas bukan sesuatu yang penting atau untuk data yang lebih dari 100, data tetap diasumsikan normal (Gujarati, 2004).

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel saling mempengaruhi dalam model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *DW (Durbin-Watson)*. Model yang bebas autokorelasi adalah model yang nilai $dU < dL$ dan nilai $dU > 4-dL$ dengan kata lain $dU < dL < 4-dL$ (Ghozali, 2013). Nilai dU diperoleh dari tabel pembandingan.

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi
Durbin-Watson
Indonesia
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,963

a Predictors: (Constant), ADK, DKI, JKA, JRKA

b Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 1,993. Nilai antara $dU < dL < 4-dL$, model Indonesia $1,81945 < 1,963 < 2,18055$ menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* dari perusahaan Indonesia tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi
Durbin-Watson
Malaysia
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,015

a Predictors: (Constant), ADK, DKI, JKA, JRKA

b Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 2,015. Nilai antara $dU < dW < 4-dU$, model Malaysia $1,86814 < 2,015 < 2,13186$ menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* dari perusahaan Malaysia tidak terjadi autokolerasi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dalam penelitian dapat dilihat dari nilai *Tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10.

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas
Indonesia
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
ADK	,887	1,128
DKI	,937	1,067
JKA	,881	1,135
JRKA	,978	1,023

a Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan Tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel ≤ 10 . Proporsi dewan komisaris (ADK) sebesar 1,128; Dewan Komisari Independen (DKI) sebesar 1,067; Jumlah Komite Audit (JKA) sebesar 1,135; Jumlah Rapat Komite Audit (JRKA) 1,023. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* perusahaan Indonesia tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas
Malaysia

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
ADK	,779	1,284
DKI	,760	1,316
JKA	,947	1,056
JRKA	,990	1,011

a Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel ≤ 10 . Proporsi dewan komisaris (ADK) sebesar 1,284; dewan komisari independen (DKI) sebesar 1,316; jumlah komite audit (JKA) sebesar 1,056; jumlah rapat komite audit (JRKA) 1,011. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* perusahaan Malaysia tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas
Indonesia
Coefficients^a

Model		Sig.
1	(Constant)	,000
	ADK	,514
	DKI	,983
	JKA	,941
	JRKA	,506

Berdasarkan Tabel 4.11 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari α (0,05). Proporsi dewan komisaris (ADK) sebesar 0,514; dewan komisaris independen (DKI) sebesar 0,983; jumlah komite audit (X_3) sebesar 0,941; jumlah rapat komite audit (JRKA) sebesar 0,506. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.12
Uji Heteroskedastisitas
Malaysia
Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	,000
ADK	,977
DKI	,364
JKA	,852
JRKA	,680

Berdasarkan Tabel 4.12 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari α (0,05). Proporsi dewan komisaris (ADK) sebesar 0,977; dewan komisaris independen (DKI) sebesar 0,364; jumlah komite audit (JKA) sebesar 0,852; jumlah rapat komite audit (JRKA) sebesar 0,680. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* perusahaan Malaysia tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.13 dan Tabel 14.

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi
Indonesia
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,439 ^a	,192	,178	,02720

a Predictors: (Constant), ADK, DKI, JKA, JRKA

b Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan tabel 4.13 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,178 atau 17,8%, hal ini menunjukkan bahwa *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia sebesar 17,8% oleh variabel proporsi dewan komisaris (ADK), dewan komisaris independen (DKI), jumlah komite audit (JKA), dan jumlah rapat komite audit (JRKA). Sedangkan sisanya 82,2% (100%-17,8%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi
Malaysia
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,180 ^a	,032	,024	,02151

a Predictors: (Constant), ADK, DKI, JKA, JRKA

b Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan Tabel 4.14 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,024 atau 2,4%, hal ini menunjukkan bahwa *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* sebesar 2,4% oleh variabel proporsi dewan komisaris (ADK), dewan komisaris independen (DKI),

jumlah komite audit (JKA), dan jumlah rapat komite audit (JRKA). Sedangkan sisanya 97,6% (100%-2,4%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji signifikan simultan (Uji F) ditunjukkan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16.

Tabel 4.15
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Indonesia
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,056	4	,014	10,162	,000 ^a
	Residual	,306	220	,001		
	Total	,362	224			

a Predictors: (Constant), ADK, DKI, JKA, JRKA

b Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan Tabel 4.15 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 10,162 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05). Jadi, variabel independen (proporsi dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan jumlah rapat komite audit) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (*mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*).

Tabel 4.16
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Malaysia
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,010	4	,003	2,807	,025 ^a
	Residual	,435	484	,001		
	Total	,445	488			

a Predictors: (Constant), ADK, DKI, JKA, JRKA

b Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan Tabel 4.16 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 2,807 dengan nilai signifikan sebesar $0,025 < \alpha$ (0,05). Jadi, variabel independen (proporsi dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan jumlah rapat komite audit) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (*mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*).

3. Uji Parsial (Uji *t*)

Uji parsial (Uji *t*) bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji parsial (Uji *t*) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.17 dan Tabel 4.18.

Tabel 4.17
Uji Parsial (Uji *t*)
Indonesia
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,546	,023		23,786	,000
	ADK	-,001	,002	-,033	-,498	,619
	DKI	-,127	,021	-,386	-6,041	,000
	JKA	-,015	,007	-,153	-2,322	,021
	JRKA	,002	,001	,140	2,238	,026

a Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.17 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{MDSCORE} = 0,546 - 0,001(\text{ADK}) - 0,127(\text{DKI}) - 0,015(\text{JKA}) + 0,002(\text{JRKA}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

- a. Proporsi dewan komisaris terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan proporsi dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,001, dengan signifikansi sebesar 0,619 > alpha (0,05) sehingga proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis pertama (H_{1a}) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

b. Dewan komisaris independen terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,127 dengan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ sehingga dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_{2a}) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

c. Jumlah komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,015 dengan signifikansi sebesar $0,021 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_{3a}) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

d. Jumlah rapat komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,002 dengan signifikansi sebesar $0,026 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat komite

audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis keempat (H_{4a}) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **diterima**.

Tabel 4.18
Uji Parsial (Uji *t*)
Malaysia
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,443	,018		25,038	,000
	ADK	-,002	,001	-,088	-1,723	,085
	DKI	-,011	,013	-,045	-,874	,383
	JKA	,003	,003	,044	,957	,339
	JRKA	,007	,002	,132	2,915	,004

a Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.18 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{MDSC} = 0,443 - 0,002(\text{ADK}) - 0,011(\text{DKI}) + 0,003(\text{JKA}) + 0,007(\text{JRKA}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

- a. Proporsi dewan komisaris terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan proporsi dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,002 dengan

signifikansi sebesar $0,085 > \alpha (0,05)$ sehingga proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis pertama (H_{1b}) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

b. Dewan komisaris independen terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,011 dengan signifikansi sebesar $0,383 > \alpha (0,05)$ sehingga dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_{2b}) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

c. Jumlah komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan jumlah komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,003 dengan signifikansi sebesar $0,339 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_{3b}) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

- d. Jumlah rapat komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan jumlah rapat komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,007 dengan signifikansi sebesar $0,003 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis keempat (H_{4b}) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **diterima**.

4. *Independent Sample t-test*

TABEL 4.19
Uji Beda *t*
Indonesia-Malaysia
Independent Samples t-test

	Levene's Test for Equality of Variances		<i>t</i> -test for Equality of Means		
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	34,894	,000	-5,386	712	,000
Equal variances not assumed			-4,856	344,738	,000

Berdasarkan Tabel 4.19 didapatkan hasil bahwa nilai F hasil *Levene's test for equality of variance* pada ukuran perusahaan sebesar 34,894 dengan signifikan 0,000 karena signifikan < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua negara tersebut (Indonesia dan Malaysia) memiliki tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* yang berbeda. Dengan demikian

hipotesis kelima (H_{5a}) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* antara Indonesia dan Malaysia dinyatakan **diterima**.

5. Chow test

$$F = \frac{(RSSr - RSSur)/k}{(RSSur)/(n1 + n2 - 2k)}$$

$$RSSur = 0,306 + 0,435 = 0,741$$

$$RSSr = 0,824$$

$$n = 706$$

$$k = 4$$

$$F = \frac{(0,824 - 0,741)/4}{(0,741)/(225 + 489 - 8)}$$

$$F = \frac{0,02075}{0,001} = 20,75$$

$$F \text{ hitung} = 20,75$$

$$F \text{ tabel} = 2,384$$

$$F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$$

Hasil *Chow test* menunjukkan bahwa nilai *F* hitung sebesar 20,75 dan *F* tabel sebesar 2,384 yang berarti pengaruh proporsi dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan jumlah rapat komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* antara Indonesia dan Malaysia memang berbeda. Dengan demikian hipotesis kelima (H_{5b}) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh mekanisme *corporate*

governance terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* antara Indonesia dan Malaysia **diterima**.

E. Pembahasan (Interpretasi)

a. Hubungan proporsi dewan komisaris terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Proporsi dewan komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di perusahaan, proporsi dewan komisaris yang efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari empat belas orang. Peran dewan komisaris diharapkan mampu mengawasi kinerja *CEO* yang akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan. Baiknya kualitas laporan yang disajikan maka akan meningkatkan transparansi dalam pengungkapan.

Hasil uji parsial di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis pertama (H_{1a} dan H_{1b}). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.*, (2012), Pitasari dan Septiani (2014) bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

Tidak berpengaruhnya variabel proporsi dewan komisaris dalam penelitian dugaan dari peneliti karena jumlah dewan komisaris yang terlalu besar akan lebih sulit dalam proses pengambilan keputusan, banyaknya ide/fikiran masing-masing dewan komisaris akan membutuhkan waktu yang

lebih lama untuk mengambil satu kesimpulan sehingga kinerja menjadi kurang efektif. Di Malaysia, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturan-aturan yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Berdasarkan peraturan dari *Securities Commission of Malaysia (SCM)* tentang “*Inspection dan Inquiry*” bahwa perusahaan harus selalu siap baik dengan adanya pemberitahuan ataupun dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan sewaktu-waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya SDM yang ada di perusahaan tidak terlalu berpengaruh karena adanya regulasi yang mengatur untuk memberikan pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas baik. Di Malaysia juga didirikan Badan Pencegah Rasuah (BPR) yang bertugas untuk mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi di perusahaan sektor swasta maupun publik.

b. Hubungan dewan komisaris independen terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan mampu meminimalisasi adanya konflik keagenan yang terjadi di perusahaan. Peran komisaris bertindak sebagai *monitoring*, penasihat manajemen, dan pengawasan atas kebijakan manajemen. Dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu meningkatkan pengungkapan. Proporsi dewan komisaris independen dapat

memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil uji parsial di Indonesia menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan di Malaysia tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure konvergensi IFRS* yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis kedua (H_{2a} dan H_{2b}). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Istiqomah dan Diyah (2014), Utami *et al.*, (2012) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure konvergensi IFRS*.

Peran komisaris independen dan *regulator* hampir sama yaitu untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan memastikan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang ditetapkan oleh *regulator* telah diterapkan dalam perusahaan. Namun, peran komisaris independen dalam suatu perusahaan menjadi kurang maksimal karena jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan anggota komisaris yang berasal dari internal perusahaan. Pemegang saham lebih suka mempercayakan perusahaannya kepada komisaris dari internal perusahaan itu sendiri yang dianggap mengetahui seluk beluk perusahaan secara keseluruhan.

Peraturan dewan komisaris independen di Indonesia dan Malaysia sama, yaitu jumlah dewan komisaris independen setidaknya sepertiga (30%) dari jumlah anggota dewan secara keseluruhan, dan tiap proporsi dewan komisaris independen mempunyai reputasi baik, kredibilitas, dan memiliki ketrampilan dan pengalaman untuk memberikan penilaian secara independen.

c. Hubungan Komite Audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan kode tata kelola perusahaan di Malaysia menyatakan bahwa masing-masing perusahaan perlu memiliki komite audit. Di Malaysia, dewan perlu membuat komite audit yang setidaknya berjumlah 3 anggota yang mayoritas adalah independen. Semua anggota harus mengerti masalah finansial dan salah satu di antaranya harus menjadi anggota dari asosiasi akuntansi.

Komite audit di Indonesia adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja dewan direksi dan manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Ketika pengendalian internal komite meningkat maka sistem dalam perusahaan juga semakin baik yang juga dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan.

Hasil uji parsial di Indonesia menunjukkan komite audit berpengaruh negative dan di Malaysia komite audit tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis ketiga (H_{3a} dan H_{3b}). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.*, (2012), Ujiyantho dan Pramuka (2007) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* serta penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan Diyah (2014), Nafisah (2011) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan. Ini dapat terjadi karena jumlah anggota yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam berkomunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Jika jumlah anggota komite audit terlalu besar di dalam perusahaan, maka komunikasi dan koordinasi akan menjadi sulit dilakukan sehingga tugas pemeriksaan dan pengawasan komite audit untuk membantu dewan komisaris menjadi kurang efektif, tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* yang lebih tinggi.

Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap pengungkapan diduga peneliti karena belum optimalnya kinerja komite audit dalam memantau dan melaksanakan pengendalian internal perusahaan. Adanya beberapa anggota komite audit yang memiliki relasi dengan pengelola perusahaan mempengaruhi independensi yang dimiliki. Banyaknya jumlah audit yang ada di perusahaan bukan jaminan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga komite audit tidak terlalu berpengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan. (Nafisah, 2011)

d. Hubungan jumlah rapat komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, di Indonesia memiliki peraturan yang sama mengenai komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali

dalam satu tahun (FCGI, 2001). Sama halnya di Malaysia, komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit satu kali setiap kuartal. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas rapat yang dilakukan oleh komite audit secara otomatis akan meningkatkan pengawasan dalam pengungkapan laporan keuangan.

Hasil uji parsial di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* yang berarti hasil penelitian menerima hipotesis keempat (H_{4a} dan H_{4b}). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyono *et al.*, (2012), Pitasari dan Septiani (2014) membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit mengkomunikasikan setiap hasil rapat kepada pengelola perusahaan, sehingga meminimalisasi adanya kekurangan atau kesalahan dalam pengungkapan laporan. Tindak lanjut dari hasil rapat komite audit menjadi bentuk pengawasan yang lebih baik di perusahaan.

e. Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan Indonesia telah melakukan adopsi penuh *IFRS* mulai 1 Januari 2012, namun penerapannya telah dilakukan secara bertahap dengan penerapan

19 PSAK dan 7 ISAK. Indonesia yang merupakan full member dari *IFAC* dan juga anggota dari *WTO* memberikan tanggapan yang cukup baik dan mendukung adanya harmonisasi standar melalui adopsi *IFRS* yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Dampak dari penerapan *IFRS* di Indonesia diantaranya : penyajian laporan keuangan, yaitu konsep *Other Comprehensive Income (OCI)* didalam laba rugi komprehensif, perubahan definisi-definisi seperti kewajiban (liabilitas) dan hak minoritas menjadi bagian non-pengendali (*non-controlling interest*), pos luar biasa tidak lagi di perbolehkan, klasifikasi instrument keuangan, dan perubahan nama laporan keuangan. Komponen laporan keuangan setelah *IFRS* : laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penghargaan kepada perusahaan dengan laporan keuangan terbaik dalam ajang tahunan *Annual Report Award (ARA)*. Penghargaan diberikan berdasarkan praktik *Good Corporate Governance (GCG)*.

Di Malaysia, *Financial Reporting Foundation (FRF)* dan *Malaysian Accounting Standards Board (MASB)* pada tahun 2008 telah mengumumkan tentang rencana untuk mengkonvergensi penuh *IFRS* pada 1 Januari 2012. *Malaysia Accounting Standards Board (MASB)* telah memasukkan ketentuan standar internasional ke dalam standar lokal akuntansi di Malaysia. Kepatuhan dengan *IFRS*, yang digunakan lebih dari seratus Negara diseluruh dunia, akan

memfasilitasi komparatif dan meningkatkan transparansi, kemudahan komunikasi, melintasi perbatasan *listing*, dan mendorong arus modal.

Secara keseluruhan, dampak penerapan *IFRS* di Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda yaitu berkaitan dengan perubahan nama laporan keuangan dan item-item yang disajikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, regulasi yang cukup tegas di Malaysia mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan secara lengkap sesuai yang telah ditetapkan. Sedangkan di Indonesia regulasinya masih terlihat lemah, karena belum adanya aturan untuk menindak secara tegas perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya secara berkualitas sehingga menimbulkan adanya manipulasi ataupun sejenisnya.

f. Perbedaan pengaruh *corporate governance* terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* antara Indonesia dan Malaysia

Hasil *Chow test* menunjukkan adanya perbedaan *pengaruh corporate governance* terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* antara Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini sesuai dengan Rikhana (2015) yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pengungkapan antara Indonesia dan Malaysia. Peraturan dan praktik tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab adanya perbedaan penerapan tata kelola perusahaan. Standar laporan keuangan di Indonesia menggunakan standar Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 yang diberisikan komponen lengkap penyajian laporan keuangan yang telah dikonvergensi dengan *International Accounting*

Standards (IAS) serta *International Financial Reporting Standards (IFRS)* sehingga sudah baik jika dibandingkan dengan standar dan praktik laporan keuangan di internasional. Indonesia memiliki kode tata kelola sendiri yang telah diadaptasi dari *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* dimana kode itu telah disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) ditahun 2006 dengan nama *Code of Good Corporate Governance* yang mulai diterapkan oleh Bapepam-LK untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sedangkan di Malaysia, standar laporan keuangan menggunakan standar *Malaysia Accounting Standard Board (MASB)*, mengatur penyajian laporan keuangan yang sudah mengadopsi *Internasional Accounting Standards (IAS)* sehingga baik standard an praktik juga sudah baik jika dibandingkan dengan standar internasional. Kode tata kelola di Malaysia diterbitkan oleh Bursa Efek Malaysia ditahun 2007 dengan nama *The Malaysian Code of Good Corporate Governance*.

Dilihat dari konsep *corporate governance* antara Indonesia dan Malaysia juga berbeda, dimana Indonesia menggunakan konsep *two tier system* sedangkan Malaysia menggunakan *one tier system*. Perbedaan konsep ini dapat pula menyebabkan perbedaan pengaruh *corporate governance* terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Irawan (2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan di Indonesia dan Malaysia.

TABEL 4.20
RINGKASAN SELURUH HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Kode	Hipotesis	Hasil
H_{1a}	Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Indonesia	Ditolak
H_{1b}	Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Malaysia	Ditolak
H_{2a}	Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Indonesia	Ditolak
H_{2b}	Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Malaysia	Ditolak
H_{3a}	Jumlah komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Indonesia	Ditolak
H_{3b}	Jumlah komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Malaysia	Ditolak
H_{4a}	Jumlah rapat komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Indonesia	Diterima
H_{4b}	Jumlah komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> di Malaysia	Diterima
H_{5a}	Terdapat perbedaan secara signifikan tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> antara Indonesia dan Malaysia	Diterima
H_{5b}	Terdapat perbedaan pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap <i>mandatory disclosure</i> konvergensi <i>IFRS</i> antara Indonesia dan Malaysia	Diterima